

Menjadi Indonesia dengan *Jimpitan*

Oleh : Arif Kurniar Rakhman

*Kebudayaan adalah kunci utama untuk bisa memahami peradaban.
Pun ia sekaligus berguna buat memahami manusia sebagai person.*

-Ruth Benedict-

*Nasionalisme sedasyat itu! Karena itu, dalam banyak hal
nasionalisme menemukan "bangsa" dan mengumumkan
"negara" dan dalam prosesnya lagi negara menemukan
bangsa...*

-Daniel Dhakidae-

Sewaktu kecil saya sering bertanya kepada nenek, secuil beras yang ditaruh di depan rumah pada malam hari, itu digunakan untuk apa? Nenek hanya tersenyum, sambil mengucap "itu sodaqoh untuk *mbah* Tatang!". Di desa kami, *mbah* Tatang adalah seorang kakek renta yang memiliki dua cucu kecil. Tentunya dengan kondisi seperti itu, *mbah* Tatang adalah seorang yang wajib di tolong. Namun, sesuatu yang tidak saya mengerti, kenapa hanya secuil beras? Nenek pun menjelaskan, secuil beras itu akan dikumpulkan bersama dengan secuil beras lain dari beberapa warga. Setelah semua terkumpul, sebagian beras tersebut diberikan kepada *mbah* Tatang. Saya pun tertegun dengan penjelasan nenek. Beberapa saat kemudian, saya baru mengetahui istilah untuk kegiatan tersebut, yaitu *jimpitan*. Mengingat masa itu, muncul pertanyaan, bagaimana perkembangan *jimpitan* di tengah kompleksitas budaya global yang mendesak? Dikaitkan dengan dengan konsep nasionalisme, apa relevansinya?

***Jimpitan* : Wacana Partisipasi Warga**

Berbicara nasionalisme, maka pemaknaan kita tidak bisa lepas dari proses politik. Nasionalisme seakan menjadi doktrin yang terus diproduksi. Akhirnya, bangsa sebagai ruang "kolektivitas sosiologis" dari *nation*, dibayangkan sebagai komunitas yang tidak peduli terhadap "ketidakadilan". Bangsa selalu dipahami sebagai kesetiakawanan. Pada akhirnya, selama berabad-abad banyak orang yang rela melenyapkan orang lain demi doktrin "bangsa" yang diasumsikan Anderson sebagai "yang terbatas".¹ Hal ini yang

¹ Baca Benedict Anderson. 2002. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist

menjadi persoalan besar dari nasionalisme, yaitu mengenai hubungannya dengan kekuasaan.

Tafsir nasionalisme juga berlaku di era orde baru. *Pembangunanisme* dijadikan interpretasi dominan dalam memahami nasionalisme. Model pembangunan secara *top-down* pun dilakukan sebagai konsekuensi penjagaan kekuasaan. Implementasi model pembangunan tersebut mengakibatkan ketidakikutsertaan masyarakat secara luas karena dikuasai oleh pusat. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak kreatif. Mental masyarakat secara alami terdesain untuk menggantungkan kebutuhannya kepada pemerintah pusat, sehingga tidak muncul pemikiran kritis dari masyarakat untuk mengontrol kebijakan. Dampaknya, lembaga tradisional yang dulu hidup di pedesaan memudar sebagai konsekuensi dari intervensi pemerintah pusat. Model pembangunan seperti ini kemudian dianggap gagal dalam mengembangkan potensi masyarakat, baik itu secara politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Proses dialektika pun berlanjut. Banyak kritik yang dilontarkan sebagai respon atas kondisi yang serba sentralistik. Berkembang pemikiran tentang *civil society* yang muncul di kalangan akademisi perguruan tinggi, maupun organisasi non-pemerintahan. Wacana tentang *civil society* mencoba menemukan kembali paradigma kritis yang selalu terkikis oleh rezim dominatif, yaitu sebuah paradigma yang tidak hanya terlibat secara spekulatif atau abstrak, tetapi lebih dikaitkan dengan pemihakan dan upaya emansipasi masyarakat dalam pengalaman kehidupan mereka sehari-hari.² Kearifan lokal dianggap sebagai alternatif gagasan yang harus kembali dimunculkan ditengah tantangan global dan pengaruh sistem sentralistik. Konkritnya, peranan organisasi lokal dan instrumen yang diproduksinya harus kembali dioptimalkan. *Jimpitan* sebagai salah satu instrumen emansipasi masyarakat lokal bisa menjadi kajian yang menarik.

Jimpitan adalah tradisi pungutan berupa beras dengan skala kecil yang dilakukan pada malam hari ketika sedang melakukan ronda. Setiap warga diharuskan mengeluarkan beras dengan kisaran wadah kecil dari kotak yang biasanya diletakan dipintu rumah. Seiring perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, jarang ditemukan *jimpitan* berupa beras. Sebagai gantinya, uang dijadikan bahan konsensus baru warga. Setiap rumah dapat mengeluarkan uang antara 100 - 500 rupiah permalam.

Perubahan dari beras menjadi uang dirasa efektif, mengingat banyak kendala bila *jimpitan* berupa beras itu terus dilakukan. Kendala tersebut antara lain ; *Pertama*, kualitas dan jenis beras yang berbeda antar rumah membuat kesulitan dalam mengidentifikasi

Press dan Pustaka Pelajar, hlm 10 – 11.

² Baca Masour Faqih. 2006. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, hlm 27 – 28.

proses penjualannya. *Kedua*, jika nantinya beras terkumpul, diperkirakan kisaran harganya berada dibawah beras yang bagus. Kondisi ini berdampak pada pengumpulan dana kas warga yang diperkirakan terhambat. *Ketiga*, kerepotan dalam mencari lokasi yang memadai untuk menjaga kualitas beras.

Dari dana yang terkumpul tersebut, masyarakat biasanya dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan, seperti penerangan jalan, pembuatan gapura selamat datang, pembuatan tempat pos kampling, perbaikan jalan desa dan lain sebagainya. Dana dari jimpitan tersebut, juga dapat digunakan untuk membantu beberapa warga sekitar yang terkena musibah, ataupun membantu menyantuni anak yatim. Fakta ini menunjukkan bahwa *jimpitan* mampu mendorong warga untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Belajar dari Warga Ngentak : Studi Keberhasilan dalam Pengelolaan *Jimpitan*

Kasus menarik terjadi di dusun Ngentak, desa Poncosari, kecamatan Srandakan, Bantul, Yogyakarta. Hasil dari *jimpitan*, mereka alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat di daerahnya, yaitu dengan membangun kandang sapi terpadu. Pembuatan kandang sapi terpadu dimulai pada 11 Januari 1994. Program tersebut digalakkan untuk memanfaatkan lahan berpasir di dusun Ngentak yang tidak bisa dimaksimalkan untuk bercocok tanam. Adanya Pantai Pandansimo yang berlokasi tidak jauh dari kandang sapi terpadu menjadi salah satu penyebab tanah di daerah tersebut didominasi pasir. Alasan lain, kondisi lingkungan tidak akan kondusif jika masing-masing peternak meletakkan kandang sapi di sekitar rumah. Kenyamanan dan kesehatan masyarakat menjadi titik persoalannya.

Kegiatan peternakan sapi memang bukan fenomena aneh sebagai mata pencaharian untuk menambah penghasilan. Fenomena tersebut sama halnya dengan peternakan ayam, peternakan kambing, peternakan kerbau maupun peternakan ikan. Namun, kondisi peternakan di dusun Ngentak terlihat berbeda. Peternakan sapi di sana merupakan kegiatan yang dikembangkan lewat kandang terpadu berbasis modal sosial, salah satunya dengan menggunakan instrumen *jimpitan* sebagai langkah awal. Robert Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat terhadap pemimpinnya.³ Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu *social networks* ("*networks of civic*

³ Baca RD. Putnam. 1993. "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life" dalam *the American Prospect*. Vol.13. hlm 35 – 42.

engagement”), yaitu jaringan sosial yang ada dalam masyarakat dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Kondisi ini sesuai dengan fenomena yang ada di dusun Ngentak. Logika kekeluargaan yang ada di masyarakat terakumulasi lewat *jimpitan*, kemudian diaplikasikan dengan membentuk koperasi peternak sapi atau kelompok tani ternak sebagai lembaga untuk mengurus kandang sapi terpadu. Koperasi inilah yang kemudian mampu menjadi fasilitator dalam penjualan sapi kepada pihak luar. Pola yang dimunculkan pun bersifat “saling percaya”, sehingga jarang terjadi konflik struktural. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan Fukuyama, bahwa suatu masyarakat dengan kepercayaan yang tinggi (*high-trust society*) dalam modal sosial dibentuk untuk sukses menjalankan visi dan misinya.⁴

Kelompok tani para peternak sapi dusun Ngentak bernama Kelompok Tani Ternak Pandan Mulyo. Pengurusnya adalah para peternak sapi dari dusun Ngentak sendiri. Kegiatan kelompok tani yang berbasis modal sosial tersebut merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Ini sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang harus menjadi ruang representasi warga.⁵ Dalam kaitan ini, telah adanya koperasi kelompok tani menjadi simbol representasi warga dusun Ngentak.

Jumlah populasi peternak, jumlah sapi ternak, dan kandang pun meningkat setiap tahun. Sebuah prestasi luar biasa dari proses pemberdayaan masyarakat di komunitas kecil, apalagi berasal dari aktivitas tradisi warga, yaitu *jimpitan*. Gambaran itu dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1
Rata-rata Kepemilikan Ternak Sapi Potong Pandan Mulyo (2004- 2008)

Tahun	Polulasi (ekor)	Jumlah Peternak	Jumlah Kandang
2004	208 Ekor	132	139
2005	211 Ekor	133	139
2006	212 Ekor	133	139
2007	212 Ekor	134	140
2008	217 Ekor	134	140

Data di atas menunjukkan, selain jumlah sapi yang meningkat, partisipasi masyarakat pun

⁴ Baca Francis Fukuyama. 1995. *Trust : The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York : The Free Press, hlm 7.

⁵ Baca Nuraini, “Wajah Pemberdayaan di Moyudan” dalam *Jurnal Balairung Pembangkangan Sipil* (Yogyakarta: BPPM Balairung UGM, 2007), Edisi 41, hlm 124.

meningkat. Sampai saat ini, terdapat 142 kandang yang berisi 218 ekor sapi milik 134 peternak.

Keberadaan kelompok tani ternak memiliki banyak peran, utamanya untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan peternak. Untuk mengaplikasikannya, susunan struktur sudah terbentuk rapi. Susunan ketua sebagai pemimpin kelompok, wakil ketua, sekretaris serta bendahara yang bertugas untuk membawa kas kelompok juga sudah dilengkapi dengan beberapa bagian atau seksi yang dibutuhkan dilapangan. Semisal, seksi humas yang mengurus undangan-undangan dan pertemuan-pertemuan kelompok, seksi keamanan yang mengatur sistem keamanan di lokasi kandang sapi terpadu, serta seksi peralatan yang bertugas untuk menyediakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan kelompok tani ternak dan anggotanya. Para pengurus tidak mendapatkan gaji dari kegiatan pengelolaan kelompok tani ternak tersebut. Kebanyakan mereka menganggapnya sebagai kegiatan sukarela berdasarkan kekeluargaan.

Selain itu, upaya meningkatkan kebersamaan juga terlihat jelas dengan pengaturan proses jual beli sapi. Konkrit lapangannya, ketika ada *blantik* (makelar sapi dalam bahasa jawa) ingin membeli sapi, maka harus melewati ketua kelompok. *Blantik* tidak diperkenankan mendatangi langsung pemiliknya untuk menghindari konflik terhadap pemilik sapi lain yang sapinya belum diminati pembeli. Selain mengatur mengenai langkah awal jual beli, peraturan yang ada juga mengatur seberapa besar uang masukan untuk kas kelompok. Ketika salah satu peternak menjual ternaknya, maka ada uang insentif yang diberikan dari *blantik* dan peternak kepada kas kelompok.

Untuk pertemuan antar anggota koperasi dilakukan satu bulan sekali. Dalam pertemuan itu persoalan yang banyak dibahas adalah hal-hal yang terkait dengan kandang sapi terpadu. Mulai dari kas koperasi, ada tidaknya sapi yang sakit, hingga pengembangan fasilitas kandang. Pertemuan itu biasanya dilakukan pada hari kamis *pahing*. Terkait kesehatan sapi, berkat komunikasi yang dibangun oleh koperasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, maka dapat dipastikan selalu ada petugas untuk mengecek kesehatan sapi minimal empat kali dalam setahun. Jika ada persoalan mendadak, petugas kesehatan siap datang jika dibutuhkan.

Hasil dari limbah kotoran sapi pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Peningkatan nilai guna kotoran sapi menjadi biogas dan pupuk mulai dilirik. Hasilnya, beberapa infrastruktur sudah dibangun. Infrastruktur biogas menjadi bangunan awalnya, kemudian disusul dengan tempat penampungan limbah kotoran sapi yang digunakan untuk membuat pupuk. Namun, adanya kekurangan wawasan warga terhadap beberapa produk

yang dihasilkan membuat potensi ini sedikit terhambat. Sebagai catatan awal pada realisasi program biogas, muncul ketakutan masyarakat bahwa produk ini gampang meledak. Pun demikian dengan program pupuk, masyarakat masih memiliki ketergantungan terhadap pupuk pabrik. Namun, lambat laun kondisi ini berubah. Masyarakat mulai menyadari pentingnya produk biogas dan pupuk organik. Kesadaran itu mulai diaplikasikan dengan menggunakan kedua produk ini.

Fakta ini mengisyaratkan, bahwa hanya dengan modal sosial yang tercermin dari kegiatan *jimpitan* melalui aktivitas ronda malam bersama yang dilakukan setiap malam, maka dapat memberikan kontribusi yang positif bagi upaya pemberdayaan masyarakat yang direpresentasikan dengan kegiatan berternak di kandang sapi terpadu. Selain mendapatkan keuntungan ekonomi, kegiatan ini berdampak pada kesehatan warga. Jika dulu warga cukup direpotkan dengan wabah Demam Berdarah, maka sekarang tidak. Pun demikian dengan sektor pertanian yang berkembang seiring perkembangan ternak di kandang sapi terpadu.

Berkembangnya usaha ternak terpadu tidak berdampak pada menurunnya semangat melakukan kegiatan ronda. Tiap malam kurang lebih 30 warga dikerahkan untuk ronda. Sistem ronda dilakukan dengan memecah 30 warga untuk menempati lokasi-lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya agar semuanya terjangkau. Jadwal ronda juga sudah tersusun dengan rapi di balai tempat perkumpulan kelompok tani ternak. Seiring dengan ronda, tradisi jimpitan pun tetap berjalan. Rata-rata tiap malam hasil *jimpitan* mencapai angka 40.000 - 60.000 rupiah. Sebuah angka yang fantastis dari usaha partisipasi masyarakat di sebuah komunitas kecil.

Epilog : Antara Nasionalisme, *Jimpitan* dan Kandang Sapi Terpadu

Sejarah menunjukkan, nasionalisme muncul atas dasar kesadaran dan kebutuhan bersama untuk mewujudkan bentuk tertinggi organisasi, yaitu negara berdaulat. Pernyataan ini mensyaratkan nasionalisme yang tidak bersifat "individu", tetapi "kolektivitas" dengan tujuan kemandirian. Maka tidak salah jika Sukarno selalu mengatakan bahwa kepribadian bangsa Indonesia adalah gotong-royong. Dalam pengertian ini, gotong-royong yang bersifat tidak statis, seperti "kekeluargaan" saja, tetapi gotong royong yang berkarya.⁶ Apa yang diungkap Sukarno sangat relevan jika mengaitkannya dengan tradisi *jimpitan* dan pelaksanaan usaha ternak di kandang sapi terpadu Ngentak, Pongcosari, Srandakan, Bantul, Yogyakarta. Adanya partisipasi warga dalam mengembangkan tradisi *jimpitan* mampu mendorong pemberdayaan dalam bentuk usaha ternak di kandang sapi terpadu.

⁶ Baca Wawan Tunggal Alam (ed). 2001. *Bung Karno : Demokrasi Terpimpin Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato)*. Jakarta: Gramedia, hlm 197.

Hasilnya, dengan usaha tersebut masyarakat bisa mandiri.

Konsep kemandirian menjadi faktor penting dalam pembangunan. Konsep ini tidak hanya mengandung pengertian kecukupan diri (*self-sufficiency*) di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi faktor manusia secara pribadi yang di dalamnya mengandung unsur penemuan sikap yang mengutamakan kemampuan diri untuk mengatasi pelbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri dari berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Warga Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul, Yogyakarta membuktikan hal itu dengan sangat baik. Jadi apa itu nasionalisme? Jawabannya adalah kesadaran berpartisipasi dan kemandirian, itu saja!.[]

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Benedict. 2002. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.

Faqih, Masour. 2006. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.

Fukuyama, Francis. 1995. *Trust : The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York : The Free Press.

Nuraini, "Wajah Pemberdayaan di Moyudan" dalam *Jurnal Balairung Pembangkangan Sipil* (Yogyakarta: BPPM Balairung UGM, 2007), Edisi 41.

Putnam, RD. 1993. "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life" dalam *the American Prospect*. Vol.13.

Tunggul Alam, Wawan (ed). 2001. *Bung Karno : Demokrasi Terpimpin Milik Rakyat Indonesia*. Jakarta: Gramedia.